



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rusdy Mastura**


Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

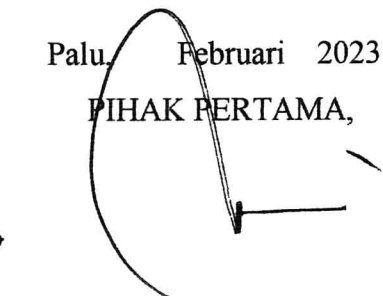
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

H. RUSDY MASTURA

Palu, Februari 2023
PIHAK PERTAMA,

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40 %
3.	Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,80 (Indeks)

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN


- | | | |
|---|--------------------|------|
| 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp. 3.142.697.075 | APBD |
| 2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp. 5.019.894.000 | APBD |
| 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp. 3.740.024.750 | APBD |
| 4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Rp. 266.624.700 | APBD |
| 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Rp. 1.171.999.600 | APBD |
| 6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 10.120.072.297 | APBD |

TOTAL ANGGARAN

Rp. 23.461.312.422,-

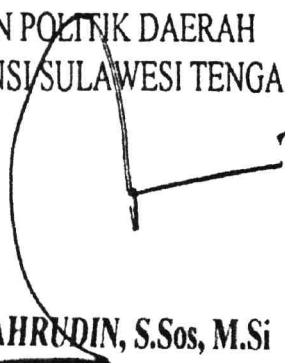
Palu, 7 Februari 2023

GUBERNUR
SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rustam Aripuddin, S.Ag, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19710102 199803 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : BIDANG POLITIK
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	- Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	40%
	I. Tersedianya Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	- Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai	5 Dokumen
	- Terlaksananya kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	1 Dokumen
	- Meningkatkan Pemahaman Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	40 orang
	- Meningkatkan pemahaman Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	120 org
	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	4 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

I Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Rp. 5.019.894.000

APBD

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik.

Rp. 5.019.894.000

- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Rp. 3.979.369.700

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Rp. 231.600.800

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Rp. 403.601.000
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Rp. 405.322.500
- TOTAL ANGGARAN** Rp. 5.019.894.000

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu 9 februari 2023

KEPALA BIDANG POLITIK

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19710102 199803 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

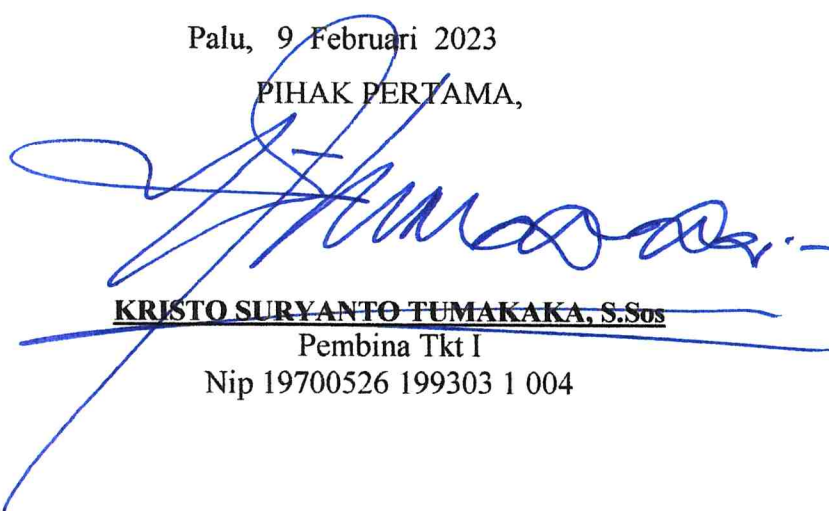
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
~~Pembina~~ Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,


KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos
Pembina Tkt I
Nip 19700526 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40%
	1. Tersedianya Dokumen Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Jumlah Dokumen kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 Dokumen
	- Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen
	- Meningkatkan Pemahaman orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	- Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang
	- Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 org
	- Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan
	- Meningkatkan pemahaman keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.	- Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.	30 keluarga

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

I Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Rp. 3.142.697.075

APBD

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Rp. 3.142.697.075

- Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rp. 191.290.625

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rp. 2.640.497.125

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rp. 141.430.850

- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rp. 127.872.150

- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Rp. 41.606.325

TOTAL ANGGARAN Rp. 3.142.697.075

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLRIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19680217 198903 1 004

Pada 9 februari 2023

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos
Pembina Tkt I
Nip 19700526 199303 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Surya, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,



Dra. SURYA, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19650330 198610 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : BIDANG KEWASPADAAN
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	- Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	40%
	1. Tersedianya Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	- Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	5 Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Meningkatkan Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Tersedianya laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. - Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Dokumen 130 orang 150 org 4 laporan 4 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.171.999.600	APBD
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.171.999.600	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 53.030.950	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 87.672.500	

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 423.025.100
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 160.573.000
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 447.698.050
- TOTAL ANGGARAN Rp. 1.171.999.600**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu 9 februari 2023

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



Dra. SURYA, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19650330 198610 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Apriani Yerlin, SE, MM**

Jabatan : Plh. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,

APRIANI YERLIN, SE, MM
Pembina
Nip 19770420 200112 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	- Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	100%
	1. Tersedianya dokumen kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	- Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5 Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - Meningkatnya Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - Tersedianya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. - Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah <i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 60 orang 60 org 4 laporan
II	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%
	2. Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5 Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. - Tersedianya Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. - Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. - Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> 60 orang 60 orang 4 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.740.024.750	APBD
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.740.024.750	

- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Rp. 3.450.000.000
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 109.798.450
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Rp. 64.979.600
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 115.246.700

II Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Rp. 266.624.700

APBD

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Rp. 266.624.700

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 96.586.150
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 69.562.775
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 100.475.775

TOTAL ANGGARAN

Rp. 4.006.649.450

Palu 9 februari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pih. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217198903 1 004

APRIANI YERLIN, SE, MM
Pembina
Nip 19770420 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19760819 199412 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : SEKRETARIAT
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	- Nilai SAKIP - IKM - Persentase Realisasi Anggaran	75 85 97,50%
	1. Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5 dokumen
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selama 1 tahun	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.120.072.297	APBD
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 441.772.800	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 26.752.050	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 42.253.200	
- Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 372.767.550	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 10.120.072.297	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip 19680217 198903 1 004

Palu 9 februari 2023

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

IWAYAN YUSMAN, AP, M.Si
 Pembina Tk1
 Nip 19760819 199412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Moh. Arief Rakhman, SE., M.Si**

Jabatan : Ka. Sub. Bag. Keuangan dan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Pembina Tit I

Nip 19760819 199412 1 001

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

Pembina

Nip 19730527 200112 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
I	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah selama 1 tahun	Persentase Realisasi Anggaran	97,50 %
Sasaran Sub Kegiatan :			
1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
2.	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4.	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
5.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
6.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Sasaran Kegiatan :			
II	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan
Sasaran Sub. Kegiatan :			
1.	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Sasaran Kegiatan :			
III	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan

Sasaran Sub. Kegiatan :			
1.	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Sasaran Kegiatan :			
IV	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan
Sasaran Sub. Kegiatan :			
1.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit
2.	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit
3.	Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Kegiatan :		
I Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.713.783.228	APBD
Sub Kegiatan :		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.424.219.628	APBD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.211.100.000	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 63.860.000	APBD
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 3.926.400	APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 7.190.800	APBD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 3.486.400	APBD
Kegiatan :		
II Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 85.141.800	
Sub. Kegiatan :		
1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 4.586.400	APBD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 71.590.700	APBD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 8.964.700	APBD

Kegiatan :

III Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 440.611.799

Sub. Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel Rp. 51.899.400 APBD
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 388.712.399 APBD

Kegiatan :

IV Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 573.455.386

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 487.000.000 APBD
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 31.840.000 APBD
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 54.615.386 APBD

SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Pembina Tkt I

Nip 19760819 199412 1 001

Palu, 9 Februari 2023

KASUB.BAG. KEUANGAN DAN ASSET

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

Pembina

Nip 19730527 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Sitti Basniah, M.Si**

Jabatan : Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19760819 199412 1 001

Palu, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA,

Dra. SITTI BASNIAH, M.Si
Pembina
Nip 19650505 199603 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan :			
I	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Indeks)
Sasaran Sub Kegiatan :			
1.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
Sasaran Kegiatan :			
II	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan
Sasaran Sub. Kegiatan :			
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
5.	Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
6.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Sasaran Kegiatan :			
III	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan
Sasaran Sub. Kegiatan :			
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Kegiatan :		
I Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 248.393.138	APBD
Sub Kegiatan :		
1. <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Rp. 248.393.138	APBD
Kegiatan :		
II Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 359.992.146	APBD
Sub. Kegiatan :		
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.492.326	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 14.999.820	APBD
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 69.962.000	APBD
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 29.400.000	APBD
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 50.000.000	APBD
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 188.138.000	APBD
Kegiatan :		
III Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 256.922.000	APBD
Sub. Kegiatan :		
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 107.922.000	APBD
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 19.000.000	APBD
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 130.000.000	APBD

SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SUWAWESI TENGAH

IWAYAN YUDANA, AP, M.Si

Pembina Tkt I

Nip 19760819 199412 1 001

Palu, 9 Februari 2023

KASUB.BAG. KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

Dra. SITTI BASNIAH, M.Si

Pembina

Nip 19650505 199603 2 002